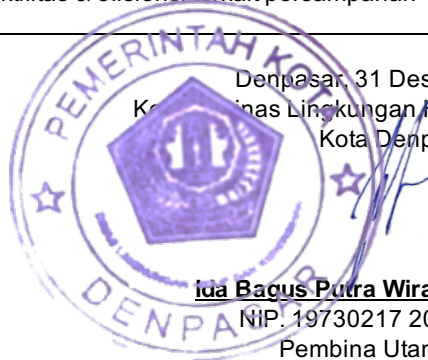


PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas air 2. Meningkatkan kualitas udara 3. Meningkatkan kualitas lahan 4. Meningkatkan tata kelola persampahan 5. Meningkatkan efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas air	65,88
	2	Indeks kualitas udara	78,09
	3	Indeks kualitas tutupan lahan	39,95
	4	Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan	34
	5	Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan	15
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas air		
	IKU Strategis: Indeks kualitas air		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas udara		
	IKU Strategis: Indeks kualitas udara		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tutupan lahan		
	IKU Strategis: Indeks kualitas tutupan lahan		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola persampahan		
	IKU Strategis: Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan		

Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah
	IKU Strategis: Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan



Denpasar, 31 Desember 2025
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
 NIP. 19730217 200003 1 002
 Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan kualitas air 2. Meningkatkan kualitas udara 3. Meningkatkan kualitas lahan 4. Meningkatkan tata kelola persampahan 5. Meningkatkan efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas air	65,88
	2	Indeks kualitas udara	78,09
	3	Indeks kualitas tutupan lahan	39,95
	4	Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan	34
	5	Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan	15
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas air		
	IKU Strategis: Indeks kualitas air		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas udara		
	IKU Strategis: Indeks kualitas udara		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tutupan lahan		
	IKU Strategis: Indeks kualitas tutupan lahan		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola persampahan		
	IKU Strategis: Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan		

Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah
	IKU Strategis: Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan



Denpasar, 31 Desember 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas air 2. Meningkatnya kualitas udara 3. Meningkatnya kualitas lahan 4. Meningkatnya tata kelola persampahan 5. Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas air	65,88
	2	Indeks kualitas udara	78,09
	3	Indeks kualitas tutupan lahan	39,95
	4	Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan	34
	5	Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan	15
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas air		
	IKU Strategis: Indeks kualitas air		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas udara		
	IKU Strategis: Indeks kualitas udara		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tutupan lahan		
	IKU Strategis: Indeks kualitas tutupan lahan		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola persampahan		
	IKU Strategis: Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan		

Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah
	IKU Strategis: Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan



Denpasar, 31 Desember 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas air 2. Meningkatnya kualitas udara 3. Meningkatnya kualitas lahan 4. Meningkatnya tata kelola persampahan 5. Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas air	65,88
	2	Indeks kualitas udara	78,09
	3	Indeks kualitas tutupan lahan	39,95
	4	Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan	34
	5	Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan	15
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas air		
	IKU Strategis: Indeks kualitas air		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas udara		
	IKU Strategis: Indeks kualitas udara		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tutupan lahan		
	IKU Strategis: Indeks kualitas tutupan lahan		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola persampahan		
	IKU Strategis: Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan		

Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah
	IKU Strategis: Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan



Denpasar, 31 Desember 2025

Kasubid Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas air 2. Meningkatkan kualitas udara 3. Meningkatkan kualitas lahan 4. Meningkatkan tata kelola persampahan 5. Meningkatkan efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah 		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target 2025
	1	Indeks kualitas air	65,88
	2	Indeks kualitas udara	78,09
	3	Indeks kualitas tutupan lahan	39,95
	4	Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan	34
	5	Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan	15
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas air		
	IKU Strategis: Indeks kualitas air		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas udara		
	IKU Strategis: Indeks kualitas udara		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tutupan lahan		
	IKU Strategis: Indeks kualitas tutupan lahan		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya tata kelola persampahan		
	IKU Strategis: Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan		

Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah
	IKU Strategis: Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan



Denpasar, 31 Desember 2025
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
 NIP. 19730217 200003 1 002
 Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

Denpasar, 31 Desember 2025

Ketua Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM


NIP.19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	

Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
 NIP. 19730217 200003 1 002
 Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

Denpasar, 31 Desember 2025

Ketala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penganggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putja Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelakuan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	



Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	



Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP: 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelakuan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelakuan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	

Denpasar, 31 Desember 2025

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	



Denpasar, 31 Desember 2025

as Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>



Denpasar, 31 Desember 2025

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

Denpasar, 31 Desember 2025

Ka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Pitra Wirabawa, S.TP.MM

NIP. 19730217 200003 1 002

Pembina Utama Muda

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
Sumber Data	: Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 3. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <p>Kegiatan Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4. Pemulihann Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kab/Kota 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 7. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8. Pengelolaan Sampah 9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11. Administrasi Umum Perangkat Daerah 12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen
	2	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen
	3	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan
	4	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan
	5	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	- 1.792,12 Ha - 39 unit
	6	-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen
	7	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas
	8	Jumlah Volume sampah yang ditangani	260.432,79 ton/tahun
	9	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	10	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
	11	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
	12	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	13	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</p>		

	<p>Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</p> <p>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</p> <p>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</p>	
	<p>Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola</p>	
	<p>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah Kab/Kota Kegiatan : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan : - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</p>	
	<p>Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p>	
	<p>Program : Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Keluaran/Hasil Kegiatan : Jumlah volume sampah yang ditangani</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : 'Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	
	<p>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p>	



Denpasar, 31 Desember 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali
 Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Form 3.b

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Pencemaran air	RSO.26.11.15.01	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola air limbah dan emisi udara secara optimal 2) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembuangan sampah ke sungai	Internal/Eksternal	C	1. Terganggunya ekosistem darat dan terkininya sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	Masyarakat
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terupdate data pendukung penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya - Keterbatasan Anggaran	RSO.26.11.15.02	Kepala Dinas	Tidak adanya data dan informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal dan eksternal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	Pencemaran air dan udara	RSO.26.11.15.03	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola air limbah secara optimal 2) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang belum melakukan pengelolaan terhadap emisi udara yang dihasilkan 3) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembakaran dan pembuangan sampah ke sungai 4) Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor 5) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki SLO (Surat Kelayakan Operasional) Air Limbah.	Eksternal	C	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	DLHK, Masyarakat
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.26.11.15.04	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.26.11.15.05	Kepala Dinas	Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang lingkungan (Penyuluh Lingkungan Hidup)	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara	Pencemaran Udara	RSO.26.11.15.06	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang belum melakukan pengelolaan terhadap emisi udara yang dihasilkan 2) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembakaran sampah 3) Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor	Internal/Eksternal	C	1. Terganggunya ekosistem darat 2. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat

1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terupdate data pendukung penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya - Keterbatasan Anggaran	RSO.26.11.15.02	Kepala Dinas	Tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal dan eksternal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	Pencemaran air dan udara	RSO.26.11.15.03	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola air limbah secara optimal 2) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang belum melakukan pengelolaan terhadap emisi udara yang dihasilkan 3) Adanya aktivitas masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti pembakaran dan pembuangan sampah ke sungai 4) Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor 5) Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki SLO (Surat Kelayakan Operasional) Air Limbah.	Eksternal	C	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	DLHK, Masyarakat
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.26.11.15.04	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.26.11.15.05	Kepala Dinas	Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang lingkungan (Penyuluh Lingkungan Hidup)	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks kualitas Lahan	Menurunnya kualitas lahan	RSO.26.11.15.07	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1) Adanya alih fungsi lahan 2) Adanya penebangan pohon akibat peningkatan kualitas layanan umum seperti perluasan jalan dan trotoar	Eksternal	C	1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Berkurangnya produktivitas lahan dan kualitas ekosistem 3. Meningkatnya potensi pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan	Masyarakat
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terupdate data pendukung penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya - Keterbatasan Anggaran	RSO.26.11.15.02	Kepala Dinas	Tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal dan eksternal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik dalam kondisi baik	Target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara tidak tercapai	RSO.26.11.15.08	Kepala Dinas	Perlu meningkatkan sarana prasarana dalam menata pohon perindang dan penyulaman taman-taman yang diperlukan pemeliharaan secara rutin	Internal	C	1. Pohon yang terabaikan bisa mengurangi daya tarik visual ruang publik yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat. 2. Pohon dan taman yang tidak terawat dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga	DLHK

	Sasaran: Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks pengelolaan pemerintahan terkait persampahan	Tidak optimalnya tata kelola persampahan sehingga capaian Indeks Pengelolaan Pemerintahan terkait Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.09	Kepala Dinas	1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah terkait persampahan. 2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola persampahan 3. Implementasi kebijakan persampahan yang belum optimal	Internal dan eksternal	C	1. Efektivitas dan efisiensi layanan persampahan menurun 2. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan persampahan berkurang	DLHK
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terupdate data pendukung penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya - Keterbatasan Anggaran	RSO.26.11.15.02	Kepala Dinas	Tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal dan eksternal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.26.11.15.04	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat
3	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.26.11.15.05	Kepala Dinas	Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang lingkungan (Penyuluh Lingkungan Hidup)	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
4	Program Pengelolaan Persampahan	- Persentase volume sampah yang terkurangi melalui 3R - Persentase volume sampah yang ditangani	Mencemari lingkungan hidup	RSO.26.11.15.10	Kepala Dinas	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan	DLHK masyarakat
	Sasaran: Meningkatnya efektifitas & efisiensi pengelolaan sampah	Indeks efektifitas & efisiensi terkait persampahan	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah belum optimal sehingga nilai Indeks Efektivitas & Efisiensi Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.11	Kepala Dinas	1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi 2. Tingkat pemilahan sampah dari sumber yang masih rendah	Internal dan eksternal	C	1. Kinerja layanan persampahan kurang efektif dan efisien 2. Volume sampah yang ditangani tidak optimal 3. Target kinerja dan capaian indeks persampahan tidak tercapai	DLHK
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	-Tidak terupdate data pendukung penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya - Keterbatasan Anggaran	RSO.26.11.15.02	Kepala Dinas	Tidak adanya data dan Informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal dan eksternal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.26.11.15.04	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat

3	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.26.11.15.05	Kepala Dinas	Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang lingkungan (Penyuluh Lingkungan Hidup)	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
4	Program Pengelolaan Persampahan	- Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R - Persentase volume sampah yang ditangani	1. Mencemari lingkungan hidup 2. Target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.10	Kepala Dinas	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan	DLHK masyarakat



Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Pitra Wirabawa, S.TP, MM
NIP: 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Pelaksanaan	Tidak terolehnya data pendukung	ROO.26.11.15.01	Kepala Bidang	tidak adanya data dan informasi yang akurat pada OPD terkait	Internal	C	Ketersediaan data yang berkualitas dan terkini sering kali menjadi masalah, sehingga sulit untuk merumuskan perencanaan yang tepat	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.01	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.02	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
2	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Menurunnya kualitas udara perkotaan	ROO.26.11.15.02	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan emisi udara yang tidak memenuhi baku mutu 2) Polusi akibat kendaraan bermotor.	Internal, eksternal	C	1) Menurunnya derajat Kesehatan masyarakat 2) Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLHK, Masyarakat
			Pelaksanaan	Menurunnya kualitas air	ROO.26.11.15.03	Kepala Dinas	1) Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu 2) Masyarakat seringkali melakukan aktivitas di sungai (membuang sampah disungai, Makan, Cuci dan Kakus)	Internal, Eksternal	C	1) Terganggunya ekosistem darat dan perairan 2) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	DLHK, Masyarakat
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.	RF.26.11.15.03	Kepala Dinas	Adanya pemohon atau petugas yang tidak mematuhi regulasi yang berlaku,	Internal, Eksternal	C	1) Menurunnya kredibilitas organisasi 2) Pelanggaran hukum dan risiko sanksi 3) Menurunnya budaya kerja	DLHK, Masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.04	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.05	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
3	Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Target sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan tidak tercapai	ROO.26.11.15.04	Kepala Dinas	Rendahnya kualitas SDM dalam melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan	Internal, eksternal	C	1) Tujuan sosialisasi tidak tercapai 2) Menurunnya kesadaran masyarakat	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.06	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.07	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
4	Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Pelaksanaan	Tidak terlaksananya kegiatan traffic counting, roadside, uji emisi gas buang kendaraan dan penerbitan persetujuan teknis sesuai SOP	ROO.26.11.15.05	Kepala Dinas	1) Kurangnya SDM yang menguasai implementasi teknis pelaksanaan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.	Internal, eksternal	C	1) Menurunnya derajat kualitas lingkungan	DLHK, Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.08	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.09	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
5	Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara	ROO.26.11.15.06	Kepala Dinas	Kurangnya sarana prasarana dalam menata pohon penghijauan	Internal	C	1) Menurunnya estetika wajah kota 2) Menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.10	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.11	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK

6	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Pelaksanaan	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.26.11.15.07	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan 2. Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Internal, Eksternal	C	1. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan 2. Meningkatnya kasus lingkungan hidup 3. Meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLHK, masyarakat
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan	RF.26.11.15.12	Kepala Dinas	Adanya pemohon atau petugas yang tidak mematuhi regulasi yang berlaku,	Internal, Eksternal	C	1) Menurunnya kredibilitas organisasi 2) Pelanggaran hukum dan risiko sanksi 3) Menurunnya budaya kerja	DLHK, Masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.13	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.14	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
7	Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target sekolah adiwiyata	ROO.26.11.15.08	Kepala Dinas	1. Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang pengelolaan lingkungan	Internal, Eksternal	C	menimbulkan dampak pencemaran yang tidak bisa terukur secara sistematis	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.15	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.16	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
8	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	Pelaksanaan	Target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.26.11.15.09	Kepala Dinas	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kualitas lingkungan	DLHK masyarakat
			Pelaksanaan	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.26.11.15.17	Kepala Dinas	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.26.11.15.18	Kepala Dinas	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.19	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.20	Kepala Dinas	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	DLHK
			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.21	Kepala Dinas	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat daerah 1. terlambatnya laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan 2. Kesalahan administrasi keuangan	ROO.26.11.15.10	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam penyelesaian administrasi keuangan 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang administrasi keuangan	Internal	C	1) Tidak tercapainya target realisasi keuangan 2) Adanya teguran dari tim pemeriksa	DLHK
			Perencanaan	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.26.11.15.22	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurang updatenya database kepegawaian	Internal	C	1) Realisasi anggaran tidak mencapai target 2) Kelebihan anggaran yang menimbulkan SILPA	DLHK
			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.23	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pelaksanaan	Kurang tertatanya arsip administrasi kepegawaian	ROO.26.11.15.11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam administrasi kepegawaian 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung administrasi kepegawaian	Internal	C	1) Tidak optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian 2. Kesulitan dalam mencari dokumen/arsip yang dibutuhkan	DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.26.11.15.24	Kasubag Umum dan Kepegawaian	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK

			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.25	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Pelaksanaan	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.26.11.15.12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa per unit organisasi	Internal	C	Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target	Sekretariat DLHK
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.26	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Sekretariat DLHK
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	Terlambatnya pengajuan permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	ROO.26.11.15.13	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya sosialisasi tentang persyaratan pengajuan administrasi permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan 2. Kurangnya sarana prasarana pendukung	Internal	C	1) Kesulitan dalam pengajuan klaim asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.28	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.29	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan	Rawan kecurian	ROO.26.11.15.14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan aset	Internal	C	1) Tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi 2) Tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat	DLHK, masyarakat
			Perencanaan	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.30	Kepala Dinas	- Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan	Eksternal dan Internal	C	- Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK
			Pelaksanaan	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.31	Kasubag Umum dan Kepegawaian	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Sekretariat DLHK
			Pertanggungjawab an	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.32	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	DLHK



 Banjarnegara, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Dehasar
 Bagan Putu Wirabawa, S.TP.MM
 NIP.197301172000031002
 Pemimpin Utama Muda

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali			
Tahun Penilaian		: 2026			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Tidak tercapainya target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah akibat belum optimalnya keterpaduan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan infrastruktur, dan operasional pengelolaan sampah	RSP.26.11.01.18	4	4	16
2	Tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	RSP.26.11.01.19	2	2	4
II	Risiko Froud Pemda				
1	Rekayasa pada penyusunan anggaran dan perencanaan kegiatan	RF.26.11.15.	4	3	12
2	Rekayasa pada penyusunan anggaran dan perencanaan kegiatan	RF.26.11.15.	4	3	12
III	Risiko Strategis OPD				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1	Tidak optimalnya tata kelola persampahan sehingga capaian Indeks Pengelolaan Pemerintahan terkait Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.09	4	4	16
2	Mencemari lingkungan hidup	RSO.26.11.15.10	4	4	16
3	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah belum optimal sehingga nilai Indeks Efektivitas & Efisiensi Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.11	4	4	16
4	Pencemaran air	RSO.26.11.15.01	2	2	4
5	Tidak terupdate data pendukung penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setiap tahunnya	RSO.26.11.15.02	2	2	4
6	Pencemaran air dan udara	RSO.26.11.15.03	2	2	4
7	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.26.11.15.04	2	2	4
8	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.26.11.15.05	2	2	4
9	Pencemaran Udara	RSO.26.11.15.06	2	2	4
10	Menurunnya kualitas lahan	RSO.26.11.15.07	2	2	4
11	Target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara tidak tercapai	RSO.26.11.15.08	2	2	4
IV	Risiko Operasional OPD				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1	Target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.26.11.15.09	4	4	16
2	Tidak terperolehnya data pendukung	ROO.26.11.15.01	2	2	4
3	Menurunnya kualitas udara perkotaan	ROO.26.11.15.02	2	2	4
4	Menurunnya kualitas air	ROO.26.11.15.03	2	2	4
5	Target sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan tidak tercapai	ROO.26.11.15.04	2	2	4
6	Tidak terlaksananya kegiatan traffic counting, roadside, uji emisi gas buang kendaraan dan penerbitan persetujuan teknis sesuai SOP	ROO.26.11.15.05	2	2	4
7	Tidak tercapainya target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara	ROO.26.11.15.06	2	2	4
8	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.26.11.15.07	2	2	4
9	Tidak tercapainya target sekolah adiwiyata	ROO.26.11.15.08	2	2	4
10	Tidak terpenuhinya administrasi keuangman Perangkat daerah	ROO.26.11.15.10	2	2	4
11	Kurang tertatanya arsip administrasi kepegawaian	ROO.26.11.15.11	2	2	4

12	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.26.11.15.12	2	2	4
13	Terlambatnya pengajuan permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	ROO.26.11.15.13	2	2	4
14	Rawan kecurian	ROO.26.11.15.14	2	2	4
V	Risiko Fraud				
	Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.26.11.15.17	4	4	16
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.26.11.15.18	4	4	16
3	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.01	2	2	4
4	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.02	2	2	4
5	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.	RF.26.11.15.03	2	2	4
6	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.04	2	2	4
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.05	2	2	4
8	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.06	2	2	4
9	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.07	2	2	4
10	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.08	2	2	4
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.09	2	2	4
12	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.10	2	2	4
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.11	2	2	4
14	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan	RF.26.11.15.12	2	2	4
15	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.13	2	2	4
16	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.14	2	2	4
17	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.15	2	2	4
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.16	2	2	4
19	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.19	2	2	4
20	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.20	2	2	4
21	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.21	2	2	4
22	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.26.11.15.22	2	2	4
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.23	2	2	4
24	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.26.11.15.24	2	2	4
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.25	2	2	4
26	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.26	2	2	4
27	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.27	2	2	4
28	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.28	2	2	4
29	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.29	2	2	4
30	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.30	2	2	4

31	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.31	2	2	4
32	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.32	2	2	4



Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
 NIP. 19730217 200003 1 002
 Pembina Utama Muda

Kriteria Risiko				
Kriteria Kemungkinan			Kriteria Dampak	
Nilai Kemungkinan	Keterangan		Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang		1	Tidak signifikan
2	Kemungkinan Kecil		2	Rendah
3	Kemungkinan Besar		3	Tinggi
4	Hampir Pasti		4	Sangat signifikan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
	Tidak tercapainya target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah akibat belum optimalnya keterpaduan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan infrastruktur, dan operasional pengelolaan sampah	RSP.26.11.01.18	16	Kepala Daerah	1. Sistem pengurangan dan penanganan sampah yang belum terintegrasi secara menyeluruh antara aspek teknis operasional, infrastruktur, dan pengendalian dampak lingkungan. 2. Tingginya timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengolahan dan prasarana pendukung yang memadai. 3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumbernya	1. Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tidak mencapai target yang ditetapkan 2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, termasuk pencemaran tanah, air, dan lingkungan sekitar permukiman. 3. Meningkatnya keluhan masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pelayanan persampahan.
II Risiko Strategis OPD						
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Tidak optimalnya tata kelola persampahan sehingga capaian Indeks Pengelolaan Pemerintahan terkait Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.09	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah terkait persampahan. 2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola persampahan 3. Implementasi kebijakan persampahan yang belum optimal	1. Efektivitas dan efisiensi layanan persampahan menurun 2. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan persampahan berkurang
2	Mencemari lingkungan hidup	RSO.26.11.15.10	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Menurunnya kualitas lingkungan
3	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah belum optimal sehingga nilai Indeks Efektivitas & Efisiensi Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.11	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi 2. Tingkat pemilahan sampah dari sumber yang masih rendah	1. Kinerja layanan persampahan kurang efektif dan efisien 2. Volume sampah yang ditangani tidak optimal 3. Target kinerja dan capaian indeks persampahan tidak tercapai
III Risiko Operasional OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.26.11.15.09	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Menurunnya kualitas lingkungan
IV Risiko Fraud OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						

1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.26.11.15.17	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.26.11.15.18	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara



Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar

Ira Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
 NIP. 19730217 200003 1 002
 Pembina Utama Muda

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
	Tidak tercapainya target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah akibat belum optimalnya keterpaduan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan infrastruktur, dan operasional pengelolaan sampah	RSP.26.11.01.18	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber dari tingkat rumah tangga dan pelaku usaha melalui pembuatan teba vertikal dan pembagian tabung komposter 2. Pembentukan bank sampah baru 3. Peningkatan sarana dan prasarana TPS3R dan TPST Tahura	Kepala Daerah	TW I sd TW IV 2026
II Risiko Strategis OPD							
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Tidak optimalnya tata kelola persampahan sehingga capaian Indeks Pengelolaan Pemerintahan terkait Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.09	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola persampahan 2. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengelolaan persampahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2026
2	Mencemari lingkungan hidup	RSO.25.11.15.10	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis sumbernya melalui pemanfaatan teba vertikal dan bag komposter	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2026
3	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah belum optimal sehingga nilai Indeks Efektivitas & Efisiensi Persampahan tidak mencapai target	RSO.26.11.15.11	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPST dan PDU, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap bank sampah dan swakelola	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2026
III Risiko Operasional OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.26.11.15.09	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah, swakelola sampah, TPS 3R, TPST, dan PDU	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2026
III Risiko Fraud OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.26.11.15.17	Inventarisasi kerusakan dan kebutuhan suku cadang oleh pihak terkait secara berjenjang	Kurangnya pengawasan	- Membuat laporan kerusakan - Mengisi jenis kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026

2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.26.11.15.18	Penggunaan voucher BBM	Kurangnya pengawasan	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026
---	--	----------------	------------------------	----------------------	---	--	------------------------



Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP, MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali						
Tahun Penilaian	: 2026						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	1. Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber dari tingkat rumah tangga dan pelaku usaha melalui pembuatan teba vertikal dan pembagian tabung komposter 2. Pembentukan bank sampah baru 3. Peningkatan sarana dan prasarana TPS3R dan TPST Tahura	Surat Edaran, Media Sosial, Monitoring dan evaluasi	DLHK	Masyarakat	TW I sd TW IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
II Risiko Strategis							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola persampahan 2. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengelolaan persampahan	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	DLHK Kota Denpasar, Pengelola bank sampah, swakelola, TPS 3R, PDU, dan TPST	Triwulan I s/d IV Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
2	Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis sumbernya melalui pemanfaatan teba vertikal dan bag komposter	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Masyarakat	Triwulan I s/d IV Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan dan foto
3	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPST dan PDU, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap bank sampah dan swakelola	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Masyarakat dan pengelola bank sampah, swakelola, TPS 3R, PDU, dan TPST	Triwulan I s/d IV Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan dan foto
III Risiko Operasional							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah, swakelola sampah, TPS 3R, TPST, dan PDU	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Masyarakat dan pengelola bank sampah, swakelola, TPS 3R, PDU, dan TPST	Triwulan I s/d IV Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan berita acara
III Risiko Fraud OPD							
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							

1	Membuat laporan kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa buku laporan
2	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa buku laporan

Denpasar, 2 April 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
	1. Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber dari tingkat rumah tangga dan pelaku usaha melalui pembuatan teba vertikal dan pembagian tabung komposter 2. Pembentukan bank sampah baru 3. Peningkatan sarana dan prasarana TPS3R dan TPST Tahura	Monitoring dan evaluasi	DLHK	TW I sd TW IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
II Risiko Strategis						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola persampahan 2. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengelolaan persampahan	Sosialisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis sumbernya melalui pemanfaatan teba vertikal dan bag komposter	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
3	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPST dan PDU, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap bank sampah dan swakelola	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	
III Risiko Operasional						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah, swakelola sampah, TPS 3R, TPST, dan PDU	Monitoring dan evaluasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
III Risiko Fraud OPD						
Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						

1	Membuat laporan kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Pencatatan berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Pencatatan berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2026	Triwulan I Tahun 2026	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan

Denpasar, 2 April 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda

15	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.13	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.14	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
17	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.15	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.16	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
19	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.19	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
20	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.20	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
21	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.21	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
22	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.26.11.15.22	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.23	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
24	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja	RF.26.11.15.24	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.25	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
26	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.26	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
27	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.27	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
28	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.28	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
29	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.29	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
30	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.26.11.15.30	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
31	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.26.11.15.31	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
32	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.11.15.32	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 2 April 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM
NIP. 19730217 200003 1 002
Pembina Utama Muda